



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PUPUK INDONESIA GROUP
UNIT KERJA : PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

I. DATA PRIBADI

1. Nama : VERONIKA TRISNA SUKMAWATI
2. Jabatan : VICE PRESIDENT
3. NHK : 850693

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.850.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/82 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.850.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 394.500.000

1. LAINNYA, LONDON TAXI SEPEDA LIPAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
4. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 370.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 188.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 111.858.843

F. HARTA LAINNYA Rp. 571.337.190

Sub Total Rp. 3.115.696.033

III. HUTANG Rp. 800.956.552

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.314.739.481

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.